

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016–2024. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) yang dipilih berdasarkan hasil uji *Chow* dan uji *Hausman*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016–2024. Temuan ini bermakna bahwa semakin besar kemampuan daerah dalam menghimpun penerimaan dari sumber-sumber lokalnya sendiri, semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerahnya. Daerah-daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi seperti Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok terbukti memiliki kemandirian keuangan yang lebih baik dibandingkan daerah-daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah seperti Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016–2024. Ketidaksignifikanan Dana Alokasi Umum (DAU) mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal antardaerah, namun tidak mampu secara langsung mendorong kemandirian keuangan daerah karena sifatnya yang berasal dari inisiatif dan kebijakan pemerintah pusat, bukan dari kapasitas fiskal mandiri pemerintah daerah.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016–2024. Semakin besar realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

yang diterima, semakin rendah kemandirian keuangan daerah. Yang di mana penggunaan dananya telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk mendanai program-program prioritas nasional, sehingga besarnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima mencerminkan rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sektoralnya secara mandiri.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

1. Penelitian ini hanya mencakup tiga variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kemandirian keuangan daerah namun belum diikutsertakan dalam model, seperti variabel moderasi, Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal, pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), dan kemiskinan. Nilai Adjusted R-squared sebesar 79,34% menunjukkan bahwa masih ada sekitar 20,66% variasi kemandirian keuangan yang dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian ini.
2. Penelitian ini terbatas pada wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat saja, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan secara langsung pada provinsi lain yang memiliki karakteristik fiskal, geografis, dan demografis yang berbeda.
3. Periode penelitian mencakup tahun 2016–2024 yang di dalamnya terdapat masa pandemi COVID-19 (2020–2021), di mana pemerintah pusat melakukan perubahan signifikan dalam kebijakan transfer daerah yang dapat memengaruhi pola hubungan antar variabel secara struktural.
4. Data yang digunakan bersumber dari laporan realisasi APBD yang diterbitkan secara resmi, sehingga akurasi dan kelengkapan data sangat bergantung pada kualitas pelaporan masing-masing pemerintah daerah.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, temuan penelitian ini menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar utama dalam membangun kemandirian fiskal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu secara aktif mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah melalui perbaikan sistem pemungutan, perluasan basis pajak, dan penerapan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, daerah-daerah yang selama ini memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah seperti Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar perlu mendapatkan pendampingan teknis dalam pengembangan kapasitas fiskal lokalnya. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang produktif dan berorientasi laba juga perlu diprioritaskan sebagai salah satu sumber PAD yang berkelanjutan.
2. Terkait Dana Alokasi Umum (DAU) yang terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan tidak menjadikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sandaran utama pembiayaan, melainkan memanfaatkannya sebagai pelengkap dalam mendukung pemerataan layanan publik. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong kebijakan yang mengaitkan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dengan capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah, sehingga terdapat insentif fiskal bagi daerah yang berhasil memperkuat kapasitas pendapatan lokalnya. Dengan demikian, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak hanya berfungsi sebagai transfer pasif, tetapi juga menjadi katalis bagi peningkatan kemandirian fiskal daerah.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan untuk secara bertahap mengalihkan sebagian fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi penguatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah, khususnya melalui pendampingan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah sebaiknya

memanfaatkan program-program yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai infrastruktur produktif yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan basis pajak daerah, sehingga terjadi efek multiplier yang memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan variabel dengan menambahkan variabel moderasi atau variabel lain seperti, Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal, pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan kemiskinan sebagai variabel independen tambahan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia atau menggunakan analisis komparatif antarpulau untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan kemandirian fiskal di Indonesia. Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan variabel moderasi atau mediasi untuk mengkaji hubungan yang lebih kompleks antar variabel, serta memisahkan periode analisis sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 untuk menangkap perubahan struktural dalam hubungan fiskal pusat dan daerah.